

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang merupakan implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah bagian yang sangat penting dari cita-cita besar sebuah daerah. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut maka dibutuhkan sebuah model manajemen yang baik dan berkualitas. Salah satu fungsi manajemen yang paling utama adalah Perencanaan karena dari fungsi tersebutlah fungsi-fungsi lain dilaksanakan. Perencanaan merupakan cetak biru untuk pencapaian tujuan yang memuat pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan terkait dengan pencapaian tujuan tersebut. Dapat dikatakan bahwa sebuah rencana merupakan jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antara masa kini dengan masa datang yang diinginkan, karena perencanaan adalah mempersiapkan masa depan. Masa depan memang akan datang dengan sendirinya, tapi tanpa perencanaan masa depan tersebut mungkin bukan masa depan yang kita inginkan.

Kota Cimahi adalah sebuah Kota kecil yang terbentuk dan menjalankan era otonomi daerah sejak 17 tahun yang lalu. Dengan potensi sumber daya alam yang sangat terbatas maka Kota Cimahi harus berusaha keras menggali sumber daya lainnya yang memiliki daya dukung terhadap keberhasilan pembangunan Kota. Oleh karena itu disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 sebagai implementasi dari visi, misi, arah kebijakan dan Rencana Program Indikatif Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi.

Sebelum RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 ditetapkan maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi harus menyusun Rencana Strategis terlebih dahulu sebagai pedoman yang diharapkan mampu mengimplementasikan asas akuntabilitas serta peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga optimalisasi serangkaian kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat terwujud.

Renstra Perubahan yang disusun ini merupakan langkah awal yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sehingga proses pencapaian tujuan dari Visi dan Misi akan selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi sampai tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 157 seri A);
21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2018 yaitu mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum sebagai bahan pijakan penyusunan kebijakan serta maksud dan tujuan dalam penyusunan Renstra Perubahan.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai representasi dari tugas dan kewenangan organisasi yang diamanatkan untuk mencapai tujuannya yaitu pelayanan kepada masyarakat; sumber daya yang digunakan oleh organisasi yaitu manusia dengan segala kemampuan, inovasi, pemahaman aspek administratif serta alat dan peralatan yang mendukung pelaksanaan kinerja; Kinerja pelayanan yang memberikan deskripsi berbagai syarat dan dokumen yang digunakan dan jumlah pelayanan yang dilakukan selama satu tahun; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD, sebagai bentuk data input untuk perbaikan pelayanan dan peningkatan berkesinambungan.

Bab 3 Permasalahan dan Isu - isu Strategis Perangkat Daerah

Dimulai dengan identifikasi masalah berdasarkan tupoksi dinas yang merupakan keadaan terkini baik yang merupakan faktor pendorong dan penghambat, tuntutan pelayanan kepada masyarakat maupun kebijakan pemerintah, telaahan visi dan misi KDH terpilih, telaahan Renstra, telaahan RTRW serta kajian lingkungan hidup strategis.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang .

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Daerah/tugas Walikota untuk merumuskan kebijakan Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kota Cimahi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja wewenang Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pengawasan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Hubungan Industrial, pelaksanaan urusan Kesekretariatan terdiri atas Sekretaris dan 2 Sub Bagian. Adapun fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah :

1. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilakukan secara profesional oleh Sumber Daya Aparatur yang ada di dalamnya dan tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya aparatur pada Dinas Tenaga Kerja saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan eselon II B : 1 orang
- b. Jabatan eselon III A : 1 orang
- c. Jabatan eselon III B : 2 orang
- d. Jabatan eselon IV A : 6 orang
- e. Unsur Pelaksana : 15 orang
- Jumlah keseluruhan : 25 orang

Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilihat dari aspek golongan, pendidikan dan masa kerja adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural

No	Jabatan/Bagian	Gol/Ruang dan masa kerja	Jenjang pendidikan/jurusan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	IV/b, 16 th	S1 / Pemerintahan	1
2.	Sekretaris	IV/b, 22 th	S1 / Hukum Perdata	1
	Kasubbagian Umum dan Kepegawaian;	III/d, 30 th	S1 / Akuntansi	1
	Kasubbagian Program dan Keuangan.	III/c, 15 th	S2 / Magister Pemerintahan	1
3.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IV/a, 20 th	S.1/Pendidikan	1

	Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan	III/d, 22 th	S.1/Ilmu Pemerintahan	1
	Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	III/d, 10 th	S.2/Adm. Publik	1
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	IV/a, 18 th	S.1/Pendidikan Olah Raga	1
	Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;	III/d,22 th	S.2/ Sosial	1
	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	III/c,14 th	S.2/Managemen	1
J u m l a h				10

2. Umum

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
A.	Masa Kerja 0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun 30 tahun ke atas	16 Orang 8 Orang 6 Orang 8 Orang 1 Orang 1 Orang -	Dihitung berdasarkan Masa kerja seluruhnya.
B.	Golongan I II III IV	1 Orang 4 Orang 17 Orang 5 Orang	
C.	Pendidikan SMP SMA DIII S.1 S.2	1 Orang 3 Orang 4 Orang 13 Orang 4 Orang	

3. Asset

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	MOBIL	4	
2	MOTOR	7	
3	MEJA KERJA	20	
4	LEMARI BESI	20	
5	KOMPUTER	26	
6	FILLING KABINET	5	

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Tenaga Kerja merupakan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang maka untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi ketenagakerjaan dan transmigrasi yang didasarkan pada landasan operasional diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
- f. Undang-undang nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- h. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- k. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
- l. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;

- m. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- n. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- o. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- t. Kepres Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88, mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
- u. Kepres Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan di Perusahaan;
- v. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- y. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- z. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207)

Adapun Program Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi yang dicapai dalam masa tahun 2016 sebagai wujud kinerja pelayanan SOPD adalah sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Taregt NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terfasilitasinya Pencari Kerja di Kota Cimahi melalui Pelayanan Sistem Antar Kerja dan Bursa Kerja Online (BKOL) Terwujudnya Sinergitas antar Stakeholder dalam Pelayanan Perpanjangan IMTA di Kota Cimahi				3.000 Orang Pencaker 35 Perusahaan dan 5 LPK -	1.000 Orang Pencaker - 1 Dokumen	1000 Orang Pencaker	1000	1000	2.819 orang Pencaker, 35 Perusahaan dan 5 LPK -	2.934 Orang - 1 Dokumen	2.903 Orang Pencaker	1882	1882	93,97% 100,00% -	293,40% - 100,00%	290%	188 %	188 %
	Persentase penempatan kerja				50%	87%	90%	1000	1000	93,96%	88,87%	31,31%	922	922	187,92%	102,15%	34,79%	92.2 %	92.2 %
	Terselenggaranya penyuluhan bimbingan jabatan ke siswa/siswi				-	1000 Siswa/Siswi	1000 Siswa/Siswi	-	-	-	1.000 Siswa/Siswi	1000 Siswa/Siswi	-	-	-	100,00%	100%	-	-
	Terselenggaranya pelatihan tenaga ahli keamanan				40 Orang peserta pelatihan	15 Orang pelatihan keamanan	-	-	-	25 Orang peserta pelatihan	15 Orang	-	-	-	62,50%	100,00%	-	-	-
	Terselenggaranya Koordinasi antar Anggota Forum Komunikasi Jejaring Kota Cimahi				50 Anggota FKJ	-	-	25	25	50 Anggota FKJ	-	-	25	25	100,00%	-	-	100%	100%
	Terselenggaranya Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai				75 Orang Pelatihan 4 Paket	-	50 Orang Peserta Pelatihan	50	50	75 Orang Pelatihan 4 Paket	-	50 Orang Peserta Pelatihan	50	50	100,00%	-	100%	100%	100%
	Terselenggaranya Sosialisasi Pemagangan Tingkat Kota Cimahi				50 Peserta Sosialisasi	-	-	100	100	50 Peserta Sosialisasi	-	-	82	82	100,00%	-	-	82 %	82 %
	Terselenggaranya Peningkatan Wawasan				25 Anggota FKJ, 7	-	-	25	25	25 Anggota FKJ, 7	-	-	25	25	100,00%	-	-	100 %	100 %

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

	Pemagangan bagi Anggota FKJP dan PNS Tingkat Kota Cimahi				Orang PNS					Orang PNS									
	Terselenggaranya Penyiapan Tenaga Kerja siap Pakai yang berbasis kompetensi dan bersertifikat				40 Orang masyarakat pencari kerja	-	10 orang	-	-	40 Orang masyarakat pencari kerja	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	Terselenggaranya Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Pembentukan Sikap dan Prilaku dengan Sertifikat				150 Orang peserta pelatihan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
	Terwujudnya pelatihan service excellent				-	50 Orang Pelatihan service excellent	120 Orang Pelatihan service excellent	-	-	-	50 Orang	50 Orang Pelatihan service excellent	-	-	-	100,00%	50%	-	-
	Terbentuknya kajian akademik mengenai penanggulangan pengangguran dan pemetaan potensi wilayah pelatihan				-	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
	Terselenggaranya Pemagangan dalam negeri				-	-	100 Orang	100	100	-	-	-	82	82	-	-	0%	82%	82%
	Terselenggaranya Uji Sertifikasi				-	-	10 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
	Kajian Ketenagakerjaan				-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100%	-	-
							2 Lokasi	2 Lokasi				2 Lokasi	2 Lokasi					100%	100%
	Pembinaan transmigrasi				1 Lokasi Penyuluhan		2 Lokasi Pembinaan			1 Lokasi Penyuluhan		2 Lokasi Pembinaan			100,00%		100,00%		
					1 lokasi Penjajagan	3 Lokasi Pembinaan				1 lokasi Penjajagan	3 Lokasi Pembinaan				100,00%	100,00%			
					1 Lokasi					1 Lokasi									

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

					Pembinaan Pengiriman 8 KK					Pembinaan Pengiriman 5 KK					100,00%				
															62,50%				
	Terlaksananya Optimalisasi pembinaan LKS Tripartit.				6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya Optimalisasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)				12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pemilihan Pekerja Teladan				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
	Tersosialisasi kannya UMK setiap Tahunnya				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
	Terselesaikannya Kasus PHI				12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	8 Kasus	8 Kasus	9 Kasus	6 Kasus	11 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	75,00%	50,00%	91,6%	87.5 %	87.5 %
	Terlaksananya Temu Konsolidasi SP/SB				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%
	Terlaksananya Bimtek Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja				60 Kasus	60 Kasus	-	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	-	60 Kasus	60 Kasus	100,00%	100,00%	-	100,00 %	100,00%
	Terlaksananya Zerro Accident Award Kota Cimahi				-	5 Perusahaan	-	-	-	-	2 Perusahaan	-	-	-	-	40,00%	-	-	-
	Tersosialisasi Sitem Jaminan Sosial Nasional				-	130 Peserta	-	-	-	-	130 Peserta	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
	Terlaksananya Penilaian Perusahaan Terbaik yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan				5 Perusahaan	5 Perusahaan	-	-	-	5 Perusahaan	5 Perusahaan	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
	Tersosialisasi Pencegahan				1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

	dan Penanggulangan HIV/AIDS dan TB di Tempat Kerja				100 Peserta	-	-	-	-	100 Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Peningkatan Penerapan Norma K3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Peringatan Bulan K3 Nasional Tingkat Kota Cimahi Tahun 2014				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%
	Terlaksananya Rapat Teknis P2K3				-	80 Peserta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	80 Peserta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%
	Terlaksananya Sosialisasi PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3				150 Peserta	-	-	-	-	150 Peserta	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	Terlaksananya Penilaian Perusahaan Terbaik K3 Tingkat Kota Cimahi				5 Perusahaan	-	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	-	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%
	Tingkat penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui perjanjian bersama				35%	40%	45%	50%	50%	30%	40%	53,33%	87.50 %	87.50 %	85,71%	100%	118,51%	175 %	175 %
	Kepesertaan buruh dalam program Jamsostek				80%	85%	90%	90%	90%	82,20%	82,16%	77,55%	70 %	70 %	102,75%	96,66%	86,17%	77.9 %	77.9 %
	Cakupan fasilitasi keselamatan dan perlindungan kerja				80%	85%	90%	90%	90%	79,85%	60,98%	42,58%	57.3 %	57.3 %	99,81%	71,72%	47,31%	63.7 %	63.7 %
	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai				50 Orang Pegawai	50 Orang Pegawai	45 orang	-	-	50 Orang Pegawai	50 Orang Pegawai	45 orang	-	-	100,00%	100,00%	100%	-	-
	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana SKPD (LAKIP, RENJA, RENSTRA, LPPD, LKPJ, RKA Perubahan 2014, PROFL DINAS)				6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	100,00%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

	Tersediannya dokumen Laporan Keuangan Semesteran				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tersediannya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Terpeliharanya Gedung/Ruangan Kantor				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Terpenuhiya kebutuhan BBM dan Pelumas kendaraan dinas				5 unit roda 4 9 unit roda 2	5 unit roda 4 9 unit roda 2	6 unit roda 4 9 unit roda 2	6 unit roda 4 9 unit roda 2	6 unit roda 4 9 unit roda 2	5 unit roda 4 9 unit roda 2	5 unit roda 4 9 unit roda 2	6 unit Roda 4 9 unit roda 2	6 unit roda 4 9 unit roda 2	6 unit roda 4 9 unit roda 2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas				5 unit roda 2	-	1 unit roda 4	-	-	5 unit roda 2	-	1 unit roda 4	-	-	100,00%	-	100,00%	-	-
	Terselenggaranya pelayanan jasa surat menyurat				-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tersediannya sarana komunikasi				2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	2 Line Telepon 1 Line Internet	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Terasuransikannya kendaraan dinas/operasional				5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Tersediannya jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	5 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan				5 Orang	5 Orang	7 orang	7 orang	7 orang	5 Orang	5 Orang	7 orang	7 orang	7 orang	100,00%	100,00%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

	Terpenuhinya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih				1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	Terpeliharanya peralatan kerja dalam menunjang pelaksanaan tugas				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	Terpenuhinya persediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	Terfasilitasinya konsumsi rapat-rapat Dinas dan Kunjungan Tamu				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, keluar daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan Keluar Provinsi Jawa Barat				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Capaian Renstra SKPD Tahun Ke -					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	93,835,840	71,575,000	156,650,000	99,691,000	-	76,655,900	46,370,000	86,025,000	77,461,000	-	81.69	64.79	54.92	77.70	0.00	84,350,368	57,302,380
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	93,835,840	71,575,000	156,650,000	99,691,000	-	76,655,900	46,370,000	86,025,000	77,461,000	-	81.69	64.79	54.92	77.70	0.00	84,350,368	57,302,380
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	19,843,200	27,187,000	30,075,000	22,000,000	-	18,343,200	19,877,000	28,350,000	15,760,000	-	92.44	73.11	94.26	71.64	0.00	19,821,040	16,466,040
Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	19,843,200	27,187,000	30,075,000	22,000,000	-	18,343,200	19,877,000	28,350,000	15,760,000	-	92.44	73.11	94.26	71.64	0.00	19,821,040	16,466,040
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	73,699,000	267,863,000	119,950,000	306,364,000	-	65,213,600	205,995,300	112,018,600	296,095,379	-	88.49	76.90	93.39	96.65	0.00	153,575,200	135,864,576
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	73,699,000	267,863,000	119,950,000	306,364,000	-	65,213,600	205,995,300	112,018,600	296,095,379	-	88.49	76.90	93.39	96.65	0.00	153,575,200	135,864,576
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	401,944,100	370,710,000	211,250,000	157,710,000	-	361,214,750	318,878,650	173,762,696	112,905,057	-	86.76	83.81	85.80	69.95	-	384,663,425	330,891,838
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	289,199,600	81,590,000				271,364,750	65,151,450				93.83	79.85	0.00	0.00	0.00	185,394,800	168,258,100
Penunjang Program Keluarga Harapan	112,744,500	289,120,000	200,000,000	142,710,000		89,850,000	253,727,200	163,662,696	102,715,057		79.69	87.76	81.83	71.97	0.00	186,143,625	152,488,738
Monitoring dan Evaluasi KUBE			11,250,000	15,000,000				10,100,000	10,190,000		0.00	0.00	89.78	67.93	0.00	13,125,000	10,145,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	150,170,700	144,395,000	465,518,000	547,000,000	-	146,728,400	136,137,500	420,628,000	366,820,000	-	97.71	94.28	90.36	67.06	0.00	326,770,925	267,578,475
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	150,170,700	144,395,000	465,518,000	547,000,000		146,728,400	136,137,500	420,628,000	366,820,000		97.71	94.28	90.36	67.06	0.00	326,770,925	267,578,475
Program pembinaan anak terlantar	110,921,400	234,850,000	87,450,000	50,831,500	-	105,998,800	147,079,950	84,650,000	37,760,000	-	95.56	53.59	96.80	74.28	0.00	189,696,200	146,316,883
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar		175,700,000	87,450,000	50,831,500			126,154,950	84,650,000	37,760,000		0.00	71.80	96.80	74.28	0.00	104,660,500	82,854,983
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	110,921,400	59,150,000				105,998,800	20,925,000				95.56	35.38	0.00	0.00	0.00	85,035,700	63,461,900
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100,946,000	124,040,000	137,730,000	87,355,000	-	92,449,150	95,445,000	130,380,000	62,950,500	-	91.58	76.95	94.66	72.06	0.00	112,517,750	95,306,163
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	100,946,000	124,040,000	137,730,000	87,355,000		92,449,150	95,445,000	130,380,000	62,950,500		91.58	76.95	94.66	72.06	0.00	112,517,750	95,306,163
Program Pengembangan Wilayah	209,500,000	21,186,000	30,000,000	50,400,000	145,348,350	188,785,920	19,493,100	29,436,000	45,295,000	143,382,100	90.11	92.01	98.12	89.87	98.65	91,286,870	85,278,424

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

Transmigrasi																	
Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	209,500,000	21,186,000	30,000,000	50,400,000	145,348,350	188,785,920	19,493,100	29,436,000	45,295,000	143,382,100	90.11	92.01	98.12	89.87	98.65	91,286,870	85,278,424
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2,401,905,000	95,610,000	56,000,000	353,745,000	357,491,500	475,133,000	86,271,400	47,608,125	343,260,000	326,432,300	67.99	90.23	85.01	97.04	91.31	2,444,950,300	508,643,365
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	161,905,000	95,610,000	56,000,000	353,745,000	357,491,500	159,005,000	86,271,400	47,608,125	343,260,000	326,432,300	98.21	90.23	85.01	97.04	91.31	204,950,300	192,515,365
Pelatihan Tenaga Ahli Keamanan	240,000,000					196,334,000					81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000	196,334,000
Pelatihan untuk Tenaga Kerja Bersertifikat	500,000,000					119,794,000					23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000	119,794,000
Pelatihan Pembentukan Sikap dan Perilaku dengan Sertifikasi	1,500,000,000					-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000	-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	493,964,500	628,901,250	635,200,000	236,988,750	646,290,000	493,631,000	475,788,400	404,744,900	232,962,000	588,837,400	99.93	75.65	63.72	98.30	91.11	528,268,900	439,192,740
Penyiapan tenaga kerja siap pakai	493,964,500	628,901,250	635,200,000	236,988,750	646,290,000	493,631,000	475,788,400	404,744,900	232,962,000	588,837,400	99.93	75.65	63.72	98.30	91.11	528,268,900	439,192,740
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	924,865,000	478,474,500	693,541,000	826,447,500	1,356,290,000	698,936,000	432,139,000	583,121,095	615,437,000	1,032,706,000	75.57	90.32	84.08	74.47	76.14	855,923,600	672,467,819
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	924,865,000	478,474,500	693,541,000	826,447,500	1,356,290,000	698,936,000	432,139,000	583,121,095	615,437,000	1,032,706,000	75.57	90.32	84.08	74.47	76.14	855,923,600	672,467,819
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	226,235,000	215,543,600	140,060,000	205,000,000	51,000,000	222,154,800	200,218,600	134,053,000	197,134,000	34,609,000	98.47	92.21	47.86	94.27	33.93	209,459,650	197,042,350
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	84,875,000	89,750,000		15,000,000	51,000,000	84,514,800	79,115,000		13,807,000	34,609,000	99.58	88.15	0.00	92.05	67.86	60,156,250	53,011,450
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	141,360,000	125,793,600	140,060,000	190,000,000		137,640,000	121,103,600	134,053,000	183,327,000		97.37	96.27	95.71	96.49	0.00	149,303,400	144,030,900
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	562,729,000	1,002,274,400	1,044,830,000	921,962,150	578,330,000	528,823,912	953,803,982	952,872,816	739,439,948	490,609,665	91.13	88.69	90.43	78.75	84.68	839,521,710	748,113,970
Penyediaan jasa surat menyurat		32,400,000	44,160,000	47,472,000	38,400,000		27,675,000	39,200,000	39,360,000	38,370,000	0.00	85.42	88.77	82.91	99.92	40,608,000	36,151,250
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21,000,000	33,000,000	27,480,000	36,000,000	33,000,000	16,517,062	17,841,832	21,721,446	15,436,336	10,807,780	78.65	54.07	79.04	42.88	32.75	30,096,000	16,464,891
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	25,000,000	25,000,000	25,000,000	28,500,000	20,500,000	15,195,000	12,659,400	13,984,200	16,989,450	8,651,050	60.78	50.64	55.94	59.61	42.20	24,800,000	13,495,820
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60,025,000	63,150,000	71,750,000	78,550,000	64,600,000	48,320,700	54,658,650	64,000,300	60,556,400	47,854,600	80.50	86.55	89.20	77.09	74.08	67,615,000	55,078,130
Penyediaan jasa administrasi keuangan		46,800,000	50,100,000	61,176,000	29,424,000		46,049,600	49,335,000	32,076,500	28,012,000	0.00	98.40	98.47	52.43	95.20	46,875,000	38,868,275
Penyediaan jasa kebersihan kantor	32,383,000	37,858,000	36,207,000	36,207,000	25,000,000	27,883,000	36,265,500	36,098,500	33,647,000	25,000,000	86.10	95.79	99.70	92.93	100.00	33,531,000	31,778,800
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21,830,000	26,500,000	33,000,000	55,000,000	35,000,000	21,830,000	26,152,500	32,906,000	37,214,800	34,981,760	100.00	98.69	99.72	67.66	99.95	34,266,000	30,617,012
Penyediaan alat tulis kantor	97,044,600	89,323,600	90,000,000	90,000,000	36,731,000	96,344,500	88,019,400	87,941,000	87,941,000	36,198,500	99.28	98.54	97.71	97.71	98.55	80,619,840	79,288,880
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	81,996,400	97,024,000	50,000,000	50,000,000	36,950,000	81,192,150	94,995,600	48,192,600	47,708,600	35,726,725	99.02	97.91	96.39	95.42	96.69	63,194,080	61,563,135
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	8,458,000	5,241,000	5,956,000	5,855,500	5,935,000	99.51	87.35	99.27	97.59	98.92	6,500,000	6,289,100
Penyediaan bahan logistik kantor	11,480,000	12,156,000	15,000,000	26,630,000	15,000,000	11,479,500	12,153,000	14,847,500	26,522,800	14,993,250	100.00	99.98	98.98	99.60	99.96	16,053,200	15,999,210
Penyediaan makanan dan minuman	71,300,000	148,090,000	207,195,000	154,200,000	65,895,000	71,224,000	147,967,000	150,210,000	97,815,000	46,860,000	99.89	99.92	72.50	63.43	71.11	129,336,000	102,815,200

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	132,170,000	384,972,800	388,938,000	252,227,150	171,830,000	130,380,000	384,125,500	388,480,270	238,316,562	157,219,000	98.65	99.78	99.88	94.48	91.50	266,027,590	259,704,266
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	693,215,500	364,395,000	589,702,500	289,463,500	274,775,000	664,380,900	323,493,275	571,286,100	227,089,028	242,750,200	94.41	91.29	97.91	73.77	91.05	579,540,575	538,944,746
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	68,400,000		295,000,000			67,400,000		283,490,000			98.54	0.00	96.10	0.00	0.00	181,700,000	175,445,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	351,430,500	124,145,000	49,000,000		39,630,000	350,588,400	120,484,500	48,884,000		37,600,000	99.76	97.05	99.76	0.00	94.88	141,051,375	139,389,225
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	143,260,000	68,510,000	76,920,000	78,748,500	67,000,000	141,869,000	66,796,875	76,651,000	50,008,400	62,663,700	99.03	97.50	99.65	63.50	93.53	86,887,700	79,597,795
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130,125,000	171,740,000	168,782,500	210,715,000	168,145,000	104,523,500	136,211,900	162,261,100	177,080,628	142,486,500	80.33	79.31	96.14	84.04	84.74	169,901,500	144,512,726
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	110,300,000	-	-	-	12,112,000	106,950,000	-	-	-	11,040,000	96.65	0.00	0.00	0.00	91.15	92,256,000	89,095,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	46,400,000					45,200,000					97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400,000	45,200,000
Pengadaan pakaian KORPRI	15,700,000					15,000,000					95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700,000	15,000,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	48,200,000				12,112,000	46,750,000				11,040,000	96.99	0.00	0.00	0.00	91.15	30,156,000	28,895,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	117,175,000	71,947,250	45,000,000	-	-	114,275,000	64,731,500	39,030,000	-	-	97.53	89.97	86.73	0.00	0.00	78,040,750	72,678,833
Pembinaan Pegawai	117,175,000	71,947,250	45,000,000			114,275,000	64,731,500	39,030,000			97.53	89.97	86.73	0.00	0.00	78,040,750	72,678,833
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	111,748,000	48,388,000	50,788,000	136,788,000	295,615,000	102,937,000	46,932,400	50,176,500	129,321,950	264,389,000	95.82	95.59	98.37	91.81	94.19	128,665,400	118,751,370
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	95,022,000	31,325,000	33,725,000	119,725,000	280,000,000	86,511,000	30,875,000	33,465,000	113,942,450	249,134,000	91.04	98.56	99.23	95.17	88.98	111,959,400	102,785,490
Penyusunan laporan keuangan semesteran	8,363,000	8,531,500	8,531,500	8,531,500	10,000,000	8,063,000	8,078,200	8,210,000	7,652,000	10,000,000	96.41	94.69	96.23	89.69	100.00	8,791,500	8,400,640
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,363,000	8,531,500	8,531,500	8,531,500	5,615,000	8,363,000	7,979,200	8,501,500	7,727,500	5,255,000	100.00	93.53	99.65	90.58	93.59	7,914,500	7,565,240
	6,802,997,240	4,167,340,000	4,493,744,500	4,291,746,400	3,717,251,850	4,462,611,332	3,572,655,057	3,848,142,832	3,499,690,862	3,134,755,665	90.70	83.09	85.15	81.84	83.58	4,694,615,998	3,703,571,150

3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Cimahi yang merupakan salah satu Kota Jasa dan memiliki posisi strategis karena keberadaannya yang menjadi penghubung di antara 2 Kota Metropolitan yaitu Kota Bandung sebagai Ibu Kota provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara menjadi sebuah potensi yang jika dianalisis dengan menggunakan prinsip SWOT akan mampu mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi Pemerintah Kota sehingga diperoleh sebuah gambaran yang spesifik mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang dihadapi oleh Kota Cimahi dalam melakukan kegiatan Pembangunan Daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sektor industri menjadi potensi yang menjadi primadona bagi masyarakat Kota Cimahi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk pendatang yang bekerja pada sektor industri. Kondisi ini tentunya mengakibatkan berbagai macam dampak, baik yang sifatnya positif dalam arti menguntungkan bagi penduduk itu sendiri maupun bagi Kota Cimahi secara umum, ataupun berdampak buruk atau negatif yang bisa menimbulkan eksekusi yang tidak diharapkan.

Hal seperti dikemukakan di atas merupakan gambaran dari tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai OPD yang memiliki Tupoksi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan ketenagakerjaan. Beberapa tantangan yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut :

1. Angka pengangguran yang relatif masih tinggi dan terbatasnya kesempatan kerja;
2. Rendahnya pendidikan calon peserta pelatihan (pencari kerja) dan masih rendahnya kualitas dan produktivitas, pendidikan tenaga kerja;
3. Peminat Transmigrasi/Calon Transmigran reguler yang mendaftar sangat terbatas akibat kurangnya informasi dan pemahaman tentang transmigrasi;
4. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas;
5. Peran serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan masih belum optimal;
6. Masih rendahnya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban serta prosedur penyelesaian masalah dari sebagian pekerja masih rendah;
7. Belum harmonisnya Hubungan Industrial antara pekerja dengan pengusaha yang dapat dilihat dari gejolak mogok kerja;

8. Relatif rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui program Jamsostek;
9. Relatif masih rendahnya kesejahteraan pekerja / buruh terlihat UMK belum memenuhi standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak);
10. Relatif kurangnya peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu-isu Strategis baik internal maupun eksternal merupakan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan mewarnai pembangunan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian di Kota Cimahi tahun 2017-2022.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil capaian sasaran Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan, dan Ketrasmigrasian di Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dalam upaya menurunkan angka pengangguran, mengoptimalisasi perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan masih terdapat adanya permasalahan yang dihadapi. Beberapa Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh :

- a. Adanya kesenjangan yang signifikan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan akan pekerjaan
- b. Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran terus bertambah.
- c. Lowongan kerja yang ada tidak mampu diserap oleh pencari kerja, dikarenakan keterbatasan tingkat kompetensi keterampilan yang dimiliki,
- d. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja.
- e. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal.

2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh :

- a. Berdasarkan data pencari kerja yang membuat AK 1 masih berorientasi pada pasar kerja di sector formal
- b. Belum tergalinya potensi pencari kerja
- c. Belum teridentifikasinya faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran

- d. Belum menjadi pilihan bagi pencari kerja mengenai peluang usaha non formal

3. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga tenaga kerja, yang disebabkan oleh :

- a. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga tenaga kerja karena belum maksimal berfungsinya lembaga tenaga kerja.
- b. Belum semua fasilitas kesejahteraan di fasilitasi dalam perusahaan itu sendiri.
- c. Lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan sehingga belum memiliki efek jera bagi pengusaha.
- d. Rendahnya pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan tata cara serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- e. Lemahnya kuantitas dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) pada totalitas kerja dan peraturan perundangan ketenagakerjaan.
- f. Tidak adanya fungsi pengawasan norma kerja di tenaga kerja Kabupaten /Kota menjadikan berkurangnya kewenangan pembinaan hukum terhadap perusahaan.

4. Belum optimalnya pengembangan wilayah transmigrasi yang disebabkan oleh:

- a. Kurang optimalnya daerah penempatan transmigrasi dalam persiapan pemukiman (ketersediaan lahan, bangunan & sarpras lainnya)
- b. Minimnya SDM yang membidangi Ketransmigrasian.
- c. Kurang optimalnya penyiapan calon transmigran yang terampil dalam mengelola potensi SDA di lokasi tujuan.
- d. Kurangnya informasi mengenai transmigrasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi memiliki peran penting dalam penurunan angka pengangguran, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah Terpilih yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dari hasil telaahan visi dan misi Walikota terpilih maka dari misi yang diajukan untuk melaksanakan visi tersebut yang sesuai dan sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi 2017-2022 adalah :

MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Lainnya

Pembangunan dalam lima tahun kedepan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Sedangkan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenagakerjaan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan.

Adapun upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk :

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (*decent work*) yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama) sesuai hukum internasional;
5. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. Menyempurnakan kebijakan migrasi;
9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui Informasi Pasar kerja.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 termuat visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran Pembangunan Jawa Barat Tahun 2008 – 2013. Visi Provinsi Jawa Barat adalah **"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"**.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

- Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.
- Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
- Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi

Jawa Barat, yang di dalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Dari misi tersebut diatas dapat dilihat bahwa yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ada di Misi 1, Misi 2 dan Misi 5 dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
2. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
3. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
5. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Cimahi merupakan Kota yang berada di Bandung Metropolitan Area. Sebagai Daerah otonom yang baru berusia 16 tahun, Cimahi memiliki daya tarik tersendiri yang mampu mendatangkan para investor untuk berinvestasi di Kota Cimahi. Selain itu juga banyaknya industri di Kota Cimahi merupakan magnet bagi para pencari kerja dari dalam Kota, luar Kota Cimahi maupun diluar Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini tentunya membawa dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari banyaknya industri atau pabrik di Kota Cimahi adalah faktor lingkungan. Saat ini di beberapa Kelurahan di Kota Cimahi bisa dikategorikan sebagai daerah

konsentrasi urban. Pertumbuhan penduduk di daerah tersebut sangat tinggi, bahkan salah satu Kelurahan di Kota Cimahi yaitu kelurahan Cigugur Tengah pernah “dinobatkan” sebagai daerah terpadat di dunia. Sebuah “prestasi” yang luar biasa dan tentunya membutuhkan penanganan yang terpadu, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada lingkungan hidup namun tetap memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah perencanaan program kegiatan yang dikemas dalam suatu Rencana Strategis yang bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan Walikota.

Berbagai peraturan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat sehingga akan terwujud sebuah kelestarian lingkungan hidup yang menjadi salah satu aspek dalam pembangunan daerah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Selanjutnya secara rinci identifikasi isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Kota Cimahi tahun 2017-2022 kami tuangkan dalam analisis SWOT sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah berdasarkan fakta dan data untuk menganalisis keadaan atau kondisi yang ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah dalam rangka menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses pengidentifikasian analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis

SWOT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam Rencana Strategis SKPD 5 (lima) tahun mendatang dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

B. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal maka semua faktor kekuatan dan kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Pemerintah Kota untuk mengendalikan dan mempengaruhinya.

a. Strengths (Kekuatan)

- 1) Adanya Dasar Hukum Pembentukan SKPD yang menangani urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 2) Komitmen Pimpinan;
- 3) Adanya kegiatan dan Bursa Kerja *Online* (BKOL) bagi Pencari kerja;
- 4) Adanya Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 5) Adanya Dewan Pengupahan Kota Cimahi, LKS Tripartit, LK3S dalam penanganan masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 6) Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara SKPD dan juga dengan DPRD Kota Cimahi.
- 7) Tersedianya SDM yang profesional dan memadai;
- 8) Adanya iklim usaha yang kondusif dengan perizinan satu pintu.

b. Weakness (Kelemahan)

- 1) Terbatasnya SDM, Mediator, Instruktur Pelatihan, dan Pengantar Kerja;
- 2) Sistem Informasi Manajemen ketenagakerjaan yang belum optimal;
- 2) Pelayanan publik belum sesuai yang diharapkan.

C. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal menggambarkan faktor peluang dan ancaman. Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi positif yang berada diluar kendali pemerintah daerah yang

dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan faktor ancaman adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan.

a. Opportunities (Peluang)

- 1) Pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi dalam beberapa tahun cenderung meningkat;
- 2) Pendapatan per Kapita (Rp) Penduduk Kota Cimahi, dalam beberapa tahun mengalami peningkatan ;
- 3) Penduduk miskin dalam beberapa tahun cenderung menurun;
- 4) Banyaknya perusahaan sektor Formal di Kota Cimahi yang memperkerjakan Pekerja dengan sistem PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
- 5) Adanya dukungan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja;
- 6) Adanya Bursa Kerja Khusus (BKK) baik dari Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 7) Angka Pengangguran dalam beberapa tahun cenderung menurun;
- 8) Masih tersedianya pencari kerja yang memiliki kompetensi dan siap memasuki pasar kerja;

b. Threats (Ancaman)

- 1) Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi;
- 2) Jumlah penduduk usia kerja Kota Cimahi terus bertambah dari tahun ke tahun;
- 3) Banyaknya penduduk pendatang;
- 4) Maraknya unjuk rasa buruh;
- 5) Banyaknya pencari kerja yang belum memiliki ketrampilan kerja yang sesuai dengan lowongan kerja di pasar kerja yang ada;

Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang telah dirumuskan diatas maka pada perencanaan pembangunan tahun 2017-2022 dirumuskan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja yang meliputi permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagai berikut :

1. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja.

a. Permasalahan

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- 4) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai;

b. Isu Strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah terbatasnya lapangan kerja dan kualitas calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar.

2. Ketransmigrasian

Pelaksanaan transmigrasi di Kota Cimahi selama ini mendasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah (baik pengirim maupun penerima) dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM).

a. Permasalahan

- 1) Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat;
- 2) Relatif tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah pusat;
- 3) Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan.

b. Isu strategis pada urusan transmigrasi adalah animo masyarakat untuk bertransmigrasi relative tinggi tidak sebanding dengan kuota pemerintah pusat dan ketidaksiapan lokasi transmigrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan cerminan dari kondisi yang diinginkan. Tujuan merupakan penjabaran Visi Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra Perangkat Daerah ini berakhir.

Sedangkan sasaran adalah gambaran hal yang ingin diwujudkan guna mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi untuk tiap-tiap misi adalah :

Misi

1. Mengembangkan dan Memperluas Kesempatan Kerja dan Wirausaha
2. Meningkatkan Produktivitas dan Pengembangan Tenaga Kerja Yang Profesional dan Transmigran Yang Berkualitas.
3. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan.

a. Tujuan :

- Penurunan angka pengangguran
- *Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja*

b. Sasaran :

- Meningkatnya Kesempatan Kerja
- Meningkatkan kualitas transmigran
- Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial

c. Kegiatan :

1. Penyusunan Kajian Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak Kota Cimahi
2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja
3. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Optimalisasi Peran Lembaga Ketenagakerjaan
5. Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan

- 6. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 7. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 8. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
- 9. Optimalisasi Kelembagaan Ketenagakerjaan
- 10. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
- 11. Peningkatan kesempatan kerja melalui penempatan transmigrasi
- 12. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- 13. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
- 14. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
- 15. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
- 16. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
- 17. Pendidikan dan Pelatihan tenaga kerja
- 18. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kemandirian dan Kreatifitas Pencari Kerja
- 19. Sertifikasi Kompetensi tenaga Kerja
- 20. Fasilitasi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Siap Pakai
- 21. Kerja sama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan
- 22. Pembangunan Balai Latihan Kerja
- 23. Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya Pendapatan Buruh	Upah Minimum Kota (UMK)	2,916,372.98	3,181,762.92	3,477,348.70	3,807,349.09	4,183,895.92
	Menurunkan Angka Pengangguran	Berkurangnya pengangguran terbuka di Kota Cimahi	Jumlah penduduk Kota Cimahi yang menganggur	16,000	14,750	13,250	11,750	10,250

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Program indikatif yang dirumuskan adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan SKPD dalam melaksanakan misi. SKPD memiliki peranan aktif untuk melaksanakan program sebagai strategi menghadapi perubahan lingkungan. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 2017-2022.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah : Meningkatkan dan menciptakan kesempatan kerja;

Arah Kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah :

1. Survei biaya hidup layak bagi masyarakat dan penentuan UMK
2. Mengurangi angka perselisihan antara perusahaan dan tenaga kerja
3. Perluasan pencapaian jumlah asuransi kesehatan dan perlindungan tenaga kerja formal dan informal
4. Meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan
5. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan
6. Mengurangi angka perselisihan antara perusahaan dan tenaga kerja
7. Perluasan pencapaian jumlah asuransi kesehatan dan perlindungan tenaga kerja formal dan informal
8. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan
9. Meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan
10. Menciptakan kesempatan kerja melalui kerja sama pengiriman transmigran
11. Meningkatkan keterampilan Kerja bagi pencari kerja
12. Ketersediaan database ketenagakerjaan
13. Menyebarkan informasi ketenagakerjaan
14. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
15. Menyediakan Database dan Mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
16. Meningkatkan keahlian Kerja bagi pencari kerja
17. Meningkatkan keterampilan Kerja bagi pencari kerja
18. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja

- 19. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang disalurkan dan ditempatkan baik di dalam maupun luar negeri
- 20. Menciptakan kerjasama dengan perusahaan untuk penempatan tenaga kerja
- 21. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pembangunan balai Latihan Kerja
- 22. Mengevaluasi kinerja hasil kegiatan ketenagakerjaan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Mewujudkan Profesionalisme dan Iklim Ketenagakerjaan Yang Kondusif, Transmigran Yang Berkualitas Pada Tahun 2017”		
MISI	1 : Mengembangkan dan Memperluas Kesempatan Kerja dan Wirausaha 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Pengembangan Tenaga Kerja Yang Profesional dan Transmigran Yang Berkualitas. 3 : Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya Pendapatan Buruh	Meningkatkan kesejahteraan buruh	Survei biaya hidup layak bagi masyarakat dan penentuan UMK
			Mengurangi angka perselisihan antara perusahaan dan tenaga kerja
			Perluasan pencapaian jumlah asuransi kesehatan dan perlindungan tenaga kerja formal dan informal
			Meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan
			Meningkatkan pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan
			Mengurangi angka perselisihan antara perusahaan dan tenaga kerja
			Perluasan pencapaian jumlah asuransi kesehatan dan perlindungan tenaga kerja formal dan informal
			Meningkatkan pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan
			Meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan
Menurunkan Angka Pengangguran	Berkurangnya pengangguran terbuka di Kota Cimahi		Menciptakan kesempatan kerja melalui kerja sama pengiriman transmigran
			Meningkatkan keterampilan Kerja bagi pencari kerja
			Ketersediaan database ketenagakerjaan
			Menyebarkan informasi ketenagakerjaan
			Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
			Menyediakan Database dan Mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

			Meningkatkan keahlian Kerja bagi pencari kerja
			Meningkatkan keterampilan Kerja bagi pencari kerja
			Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja
			Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang disalurkan dan ditempatkan baik di dalam maupun luar negeri
			Menciptakan kerjasama dengan perusahaan untuk penempatan tenaga kerja
			Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pembangunan balai Latihan Kerja
			Mengevaluasi kinerja hasil kegiatan ketenagakerjaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung - Jawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1.	Penurunan angka pengangguran	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Monitoring dan Evaluasi transmigran (KK) dan Sosialisasi program transmigrasi (peserta)	83 KK	3 KK dan 300 peserta sosialisasi	166,591,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Peningkatan kesempatan kerja melalui penempatan transmigrasi	Jumlah penempatan dan pembinaan transmigrasi (KK)	N/A	-	-	penempatan 10KK	-	pembinaan 10KK	-	penempatan 15KK dan pembinaan 10KK	-	pembinaan 25KK	-	penempatan dan pembinaan 25 KK	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273,616	282,366	1,641,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja (orang)	52 orang	500	1,422,541,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersusunnya Data dan Informasi Ketenagakerjaan (paket)	0	2	218,599,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273,616	282,366	657,983,600	291.115	1,952,514,900	300.209	2,285,149,038	309.563	2,870,196,903	319.159	3,013,706,748	319.159	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Terwujudnya tenaga kerja siap pakai	N/A	2,025	163,144,600	-	-	-	-	-	-	-	-	2,025	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terfasilitasinya sebagian pencari kerja di Kota Cimahi	6753 pencari kerja	1,000	494,839,000	-	50,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000	-	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
				Jumlah media penyebarluasan informasi tenaga kerja	6 media			5 media		6 media		6 media		6 media		6 media	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

			- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	Jumlah Modul Sistem Informasi Ketenagakerjaan	0	-	-	-	-	1 Modul	100,000,000	pengelolaan	50,000,000	2 Modul	250,000,000	32 modul	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Pendidikan dan Pelatihan tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	52	-	-	240	1,080,000,000	240	1,080,000,000	240	1,080,000,000	300	1,350,000,000	1020	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kemandirian dan Kreatifitas Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang mengikuti Bimtek	N/A	-	-	150	225,000,000	200	300,000,000	200	300,000,000	300	450,000,000	850	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Sertifikasi Kompetensi tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terdaftar yang disertifikasi	N/A	-	-	25	125,000,000	30	150,000,000	40	200,000,000	50	250,000,000	145	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Fasilitas Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	2,025	-	-	2,030	253,750,000	2,100	315,000,000	2,150	322,500,000	2,200	330,000,000	8,480	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Kerja sama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengadakan kerja sama	N/A	-	-	10	30,000,000	15	45,000,000	20	60,000,000	25	75,000,000	70	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Pembangunan Balai Latihan Kerja	Jumlah BLK	0	-	-	kajian teknis	163,764,900	DED	210,149,038	1 BLK	772,696,903	1 BLK	223,706,748	1 BLK	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan	Terlaksananya Monev keteagakerjaan	N/A	1 kali	-	1 kali	25,000,000	1 kali	25,000,000	1 kali	25,000,000	1 kali	25,000,000	5 kali	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
		Meningkatkan kesejahteraan buruh	Program Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Persentase kenaikan UMK	8.71%	8.90%	-	9.10%	1,145,938,500	9.29%	956,858,648	9.49%	1,203,235,425	9.89%	922,279,966	9.89%	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Penyusunan Kajian Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak Kota Cimahi	Penyusunan Kajian Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak Kota Cimahi	0	1	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Fasilitas Penyelesaian Prosedur dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	Fasilitas Penyelesaian Prosedur dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	64.00%	-	-	70.00%	265,938,500	75.00%	266,858,648	80.00%	268,235,425		269,279,966		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Tenaga kerja 78% dan perusahaan 34%	-	-	Tenaga kerja 80% dan perusahaan 46%	90,000,000	Tenaga kerja 82% dan perusahaan 51%	30,000,000	Tenaga kerja 84% dan perusahaan 55%	32,000,000	Tenaga kerja 86% dan perusahaan 60%	35,000,000		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Optimalisasi Peran Lembaga Ketenagakerjaan	Optimalisasi Peran Lembaga Ketenagakerjaan	36	-	-	36	520,000,000	36	550,000,000	36	558,000,000	36	563,000,000		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2017 - 2022

			- Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan	Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan	150	-	-	250	270,000,000	100	110,000,000	330	345,000,000	50	55,000,000		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kenaikan UMK	8.71%	8.90%	1,125,124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	20 kasus, 2 unjuk rasa	25 kasus, 5 unjuk rasa, 2 kegiatan	226,746,000	-	-	-	-	-	-	-	-		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	200 perusahaan	300 perusahaan	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	150 perusahaan	200 perusahaan	271,378,000	-	-	-	-	-	-	-	-		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi
			- Optimalisasi Kelembagaan Ketenagakerjaan	Optimalisasi Kelembagaan Ketenagakerjaan	26 dokumen	26 dokumen	546,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		Disnaker Kota Cimahi	Kota Cimahi

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

No		Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Persentase kenaikan UMK	8.71%	-	1,145,938,500	956,858,648	1,203,235,425	22,279,966	4,228,312,539
2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kenaikan UMK	8.71%	1,125,124,000	-	-	-	-	1,125,124,000
3	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273,616	166,591,500	-	-	-	-	166,591,500
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273,616	1,641,140,000	-	-	-	-	1,641,140,000
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273,616	657,983,600	1,952,514,900	2,285,149,038	2,870,196,903	3,013,706,748	10,779,551,189

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Sangat menentukan kemana arah kebijakan organisasi akan berjalan dalam kurun waktu 1-5 tahun kedepan, juga untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari sebuah perencanaan.

Penyusunan renstra yang baik merupakan dukungan perangkat daerah terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2017 – 2022, mengingat Dinas Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap program unggulan Walikota Cimahi yaitu penyediaan 1000 lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana strategis dinas tenaga kerja masih banyak kekurangannya yang disebabkan oleh keterbatasan kami dalam mengeksplorasi berbagai hal yang berkaitan dengan substansi rencana strategis yang merupakan bagian inti dari manajemen strategis dinas kami.

Oleh karena itu kami memerlukan koreksi, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk bisa memperbaiki Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2012-2017.

Sehingga dapat memberikan manfaat khususnya untuk Kota Cimahi dan umumnya kepada berbagai pihak yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan Renstra yang akan kami susun.